

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik adanya suatu kesimpulan bahwa implementasi kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara sudah dapat dikatakan baik, meskipun jika dilihat pada beberapa aspek masih mengalami adanya kekurangan dan tidak kesesuaian. Hal tersebut antara lain:

1. Letak Pengambilan Keputusan. Kabupaten/Kota tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan TAPE.
2. Pelaksanaan Kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan masih belum merata kepada lima (5) kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan kebijakan masih berfokus kepada kriteria pengelolaan persampahan.
3. Sumber Daya Anggaran. Pemerintah Kabupaten/Kota masih mengeluhkan masalah anggaran yang diterima belum cukup jika memenuhi 5 kriteria secara keseluruhan tiap tahunnya.
4. Kepatuhan dan Daya Tangkap Pelaksana. masih ditemukan fakta bahwa belum sepenuhnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan TAPE di Kalimantan Utara.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan khusus yang mengatur terkait pelaksanaan kebijakan TAPE yang ada di Kalimantan Utara secara berkelanjutan dan mudah dipahami bagi Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan tersebut.

2. Perlu adanya pembaruan juknis dan juklak kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Perlu adanya evaluasi dan monitoring terhadap kriteria dan indikator yang harus dijalankan oleh Kabupaten/Kota maupun OPD teknis, hal ini dilakukan mengingat masalah lingkungan yang ada di setiap Kabupaten/Kota itu berbeda sehingga nantinya akan ada penyesuaian kegiatan.
4. Perlu dilakukan kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.
5. Untuk Provinsi lain yang memang memiliki sumber daya alam yang baik dan masih perlu dijaga kelestariannya diharapkan melakukan upaya aksi mitigasi agar menerapkan kebijakan TAPE di provinsinya.
6. Untuk pemerintah pusat sebaiknya segera diadakan kebijakan Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE) dalam rangka mendukung inisiatif kebijakan TAPE, TAKE, dan ALAKE yang sudah dicoba dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.